

NOTULA

Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 Keterbukaan PBJ

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa 1 September 2020

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Agenda : Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 terkait Keterbukaan Pengadaan Barang

Peserta : 1. Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (Dit. SPPEPP)

2. Indonesia Corruption Watch (ICW)

3. Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan paparan singkat mengenai usulan rencana aksi yang diajukan dalam RAN OGI 2020-2022 sebagai berikut:
 - a. Usulan rencana aksi yang sedang diajukan merupakan kelanjutan dari rencana aksi OGI 2018-2020. Namun, rencana aksi saat ini memiliki fokus pada Pengadaan Barang dan Jasa di masa pandemi.
 - b. LKPP sudah membuat sistem LPSE terkait pengadaan barang dan jasa untuk COVID-19. Namun, K/L dan Pemda belum mempunyai kewajiban untuk mengisi Sistem Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) untuk pengadaan darurat, sehingga banyak K/L belum mengisi SIRUP. Menurut data, baru terdapat 49 pemerintah kabupaten, 15 pemerintah kota, dan 5 K/L yang menggunakan LPSE COVID-19.
 - c. Selain itu, kanal LKPP khusus COVID 19 ini hanya bisa diakses oleh K/L dan Pemda sehingga publik tidak terinformasi. Jika publik ingin mengetahui pengadaan barang dan jasa, masih ditemukan kejanggalan. Misalnya, data yang diisi dalam laman Kementerian Kesehatan tidak mencerminkan pengadaan yang sesuai antara nama paket dan deskripsi pekerjaannya.
 - d. Kebutuhan akan kanal informasi dalam pengadaan barang dan jasa pandemi untuk tetap meningkatkan transparansi dan partisipasi sehingga akuntabilitas tetap terjaga. Beberapa Pemda telah melakukan praktik baik dalam keterbukaan pengadaan barang dan jasa ketika pandemi. Misalnya Dinas Kesehatan Pemprov Kalimantan Barat, sudah mampu menginformasikan pengadaan barang dan jasa sampai tingkat jenis obat, harga satuan, serta

penyediannya. Hal ini menunjukkan bahwa membuka informasi pengadaan barang dan jasa tidak terlalu sulit.

2. Perwakilan Dit. SPPEPP menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dengan usulan ICW dalam RAN OGI 2020-2022 sebagai berikut:
 - a. Dit. SPPEPP sebagai mitra kerja perencanaan dan penganggaran LKPP juga memiliki fokus pada pengadaan barang dan jasa ketika pandemi. Misalnya, terkait respon pemerintah terhadap COVID-19, K/L dihimbau untuk membeli produk UMKM karena UMKM perlu mendapat bantuan. Selain itu, Bappenas juga mendorong K/L agar menyampaikan rencana pengadaan di SIRUP. Namun tantangannya, LKPP sebagai pengampu kebijakan dan pelaksana belum mempunyai instrument untuk mewajibkan K/L menggunakan sistem PBJ ketika pandemic di SIRUP. Walaupun peraturan rencana umum pengadaan sudah ada, tapi belum ada pelaksanaan yang optimal. Untuk mendukung pelaksanaan yang optimal, Dit. SPPEPP juga membutuhkan data pengadaan dari LKPP serta data PBJ yang dikelola LKPP.
 - b. Saat ini, sistem SPSE bersifat desentralisasi. Jika ada masalah, pada praktiknya, LKPP harus ke daerah untuk membenahi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Selain itu, terdapat kasus dimana daerah menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, sehingga tender menjadi tidak transparan. Oleh karena itu, sistem akan disentralisasi kembali ke LKPP secara bertahap hingga tahun 2024.
 - c. Direktorat SPPEPP mendukung pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan melalui RAN OGI 2020-2022.
 - d. Selanjutnya, perlu upaya untuk mendorong kepatuhan K/L dalam mengisi LPSE khusus COVID baik dari sisi sistem dan akses publik. Hal ini mungkin dapat dilaksanakan dengan adanya peraturan dari LKPP dan kementerian terkait. Terakhir, keaktifan dan kepatuhan K/L dan Pemda dalam menggunakan LPSE.

III. Tindak Lanjut

1. Dit. SPPEPP akan menyampaikan dan mendiskusikan dengan unit kerja terkait di LKPP sehubungan dengan usulan RAN OGI tersebut. Perlu pendalaman lebih lanjut dengan LKPP terkait dengan teknis pelaksanaan usulan RAN OGI untuk tahun 2020-2022.
2. Sekretariat OGI akan memfasilitasi rapat selanjutnya bersama dengan Direktorat SPPEPP, LKPP, dan ICW. Rapat selanjutnya membahas bagaimana usulan ini dapat dikolaborasikan dalam kegiatan LKPP.

IV. Dokumentasi

